

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Upaya-upaya pembangunan untuk mensejahterakan rakyat banyak dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Baik itu melalui peminjaman modal, pelatihan, keterampilan, pengembangan karakter, dll. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Nanih dkk (2001. hlm. 41-42) berpendapat bahwa istilah pemberdayaan adalah terjemah dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluashorizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Menurut Edi suhartono (2005. hlm. 58) dijelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, selain itu mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannyadan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut kartasmita dalam Anwar (2007. hlm. 1), istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu maka memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Selain itu pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Moh Aziz (2005. hlm. 136) dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. *Kedua*, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Shardlow mengemukakan bahwa pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.
- 2) Biestek mengenai pemberdayaan, menurutnya prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menemukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi.
- 3) McArdle lebih menitikberatkan pemberdayaan pada proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuan melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Jika diruntut dari seluruh pengertian yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kemandiriannya dengan upaya menyediakan sarana yang dapat mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki masyarakat tersebut melalui berbagai kegiatan atau peluang yang ada, selain itu mereka dapat lebih aktif dan bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dapat berpengaruh dalam lingkungannya dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada, agar terciptanya kesejahteraan bersama sesuai dengan harapan.

Pada intinya pemberdayaan fokus pada tiga hal, yaitu: *Pemberkuasaan, Penguatan kapasitas diri, dan Memandirikan*. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan, dimana pemberkuasaan merupakan fase untuk menguatkan diri seseorang khususnya mereka yang rentan dan lemah serta mereka yang masih termaginalkan dalam kehidupan masyarakat, melalui partisipasi masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut andil dalam kehidupan sosial melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan skill atau kemampuan yang ada sehingga tercipta kemandirian. Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf hidup yang lebih baik.

Menurut pandangan penulis, pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupannya, dari yang tadinya belum mampu menjadi mampu, belum berdaya menjadi berdaya, belum berani menjadi berani, dll. Semua hal tersebut akan terlaksana dengan baik jika masyarakat yang diberdayakan ikut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya.

b. Tahapan Pemberdayaan

Sebagaimana disebutkan oleh Rr Suhartini dkk (2005. hlm. 135) ada beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.

- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan cara sosio kultural yang ada di masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson dalam Mardikanto (2013. hlm. 122), yaitu:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh perhatian atau simpati serta partisipasi masyarakat.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal (Edi Suharto, 2005. hlm. 59-60).

Selain itu ada pula tujuan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, diantaranya adalah: *Pertama*, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu, baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dilingkungan tempat tinggalnya. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga/warga.

Dalam kaitan dengan hal ini, Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Konsep pemberdayaan ada, karena adanya ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan tersebut secara tidak langsung membuat dan membentuk masyarakat ketergantungan. Oleh sebab itu konsep atau strategi pemberdayaan cukup penting untuk menguatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membentuk masyarakat yang mandiri. Biasanya pemberdayaan dibentuk didalam masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan, dengan proses berkelanjutan dan bersifat partisipatif.

Pada intinya tujuan pemberdayaan dilakukan melalui berbagai proses ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang dianggap kurang berdaya dengan memanfaatkan berbagai peluang melalui kemandiriannya. Selain itu tujuan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk penguatan bagi masyarakat, agar mereka mampu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga masyarakat yang berdaulat, sehingga sampai pada kehidupan yang sejahtera.

d. Indikator Keberdayaan

Menurut Kiefer dalam Edi Suharto (2005. hlm. 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parson mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- 1) Sebuah proses pembangunan yang berluma dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Schuler, Hashemi dan Riley sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto (2005. hlm. 63-66), mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *Empowerment Index* atau indeks pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator tersebut, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan

suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dapat dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpaksa dari pasangannya.

e. **Strategi Pemberdayaan**

Menurut Edi Suharto (2005. hlm. 66-67) dalam konteks pekerja sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, diantaranya: mikro, mezzo dan makro.

- 1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- 2) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamikakelompok biasanya dilakukan sebagai intervensi meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system-strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Sistem strategi besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Didalam Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) disebutkan beberapa strategi untuk mencapai pemberdayaan, diantaranya adalah:

- 1) Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif.
- 3) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan, menekankan pentingnya suatu proses edukatif (dalam arti luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini memasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran, membantu masyarakat memahami dan struktur opsi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

2.1.2. Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang disabilitas. Inilah yang secara kasat membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikan dengan keterbatasan inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep keterbatasan akan menghasilkan data yang *underestimate*. (BPS, 2020)

Dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, Negara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman (2006. hlm. 21) berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat, paling tidak terdapat dua macam dimensi dalam melihat sakit. Salah satunya melihat sakit sebagai gangguan biologis akibat dari suatu penyakit tertentu (*disease*) yang membuat organ-organ tubuh tidak berfungsi dengan sempurna. Segala bentuk pengobatan yang diberikan ditujukan untuk menghilangkan penyakit atau meredakan aktifitasnya sehingga semua kembali berfungsi normal.

Kusmana dan Napsiyah (2007. hlm. 1) menjelaskan bahwa pada abad ke 20 hampir semua masyarakat barat, menghubungkan disabilitas dengan kekurangan pikiran dan tubuh, yaitu meliputi orang pincang, duduk dikursi roda, menjadi korban keadaan seperti kebutaan, kekurangan pendengaran, sakit jiwa, dan gangguan jiwa. Singkatnya disabilitas sebagai sebuah ‘tragedi personal’ dan *problem social* atau bahkan dianggap sebagai beban bagi sebagian masyarakat.

Menurut Konvensi ILO, disabilitas mengacu pada kondisi di mana seseorang mengalami penurunan yang signifikan dalam kemampuannya untuk mencari, mendapatkan, dan meningkatkan kondisi pekerjaannya secara substansial, yang disebabkan oleh keterbatasan fisik atau mental yang terlihat.

Menurut *Disabled People's International* (DPI), disabilitas merupakan ketidakmampuan atau pembatasan dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara normal dan setara dengan individu lain, disebabkan oleh hambatan fisik dan sosial.

Sementara itu, *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam kemampuan untuk menjalankan aktivitas dengan cara yang dianggap normal untuk manusia. Ini menekankan aspek keterbatasan dalam melakukan aktivitas, tidak hanya secara fisik tetapi juga sosial dan mental.

Menurut pengertian saya sendiri, disabilitas merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan fisik, baik itu terjadi setelah dewasa maupun sejak lahir. Ini mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, baik secara fisik maupun dalam interaksi sosial. Keterbatasan fisik ini dapat meliputi gangguan mobilitas,

gangguan sensorik, atau masalah kesehatan lainnya yang memengaruhi fungsi tubuh secara signifikan. Dalam pengertian ini, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi yang dialami sejak lahir, tetapi juga sebagai hasil dari penyakit atau cedera yang terjadi kemudian dalam kehidupan seseorang, yang mengakibatkan:

- 1) Ketidakberdayaan dalam menjalani kehidupan sosialnya.
- 2) Keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
- 3) Keterbatasan dalam melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya.

b. Jenis Disabilitas

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah dijelaskan mengenai berbagai jenis penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup (Widinarsih, 2019. hlm. 138-139):

- 1) Penyandang disabilitas fisik merujuk pada gangguan fungsi gerak, termasuk namun tidak terbatas pada amputasi, kelumpuhan, atau kekakuan, serta kondisi seperti *paraplegia*, *cerebral palsy* (CP), dampak stroke, dampak kusta, dan keterbelakangan pertumbuhan.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual mengalami gangguan fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, meliputi kondisi seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- 3) Penyandang disabilitas mental mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Kategori tersebut mencakup gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, serta gangguan kepribadian. Selain itu, terdapat pula disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik merujuk pada gangguan salah satu fungsi panca indera, termasuk namun tidak terbatas pada disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 melanjutkan penjelasan mengenai definisi dan aspek waktu serta sifat yang menjadi dasar dalam mendefinisikan berbagai jenis penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas ganda atau multi dijelaskan sebagai mereka yang mengalami dua atau

lebih jenis disabilitas, seperti contohnya disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Selanjutnya, disebutkan bahwa kondisi ini dapat bersifat permanen atau berlangsung dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan.

Penyandang disabilitas adalah istilah yang merujuk kepada individu yang mengalami kelainan, baik fisik maupun non-fisik. Dalam kategori penyandang disabilitas, terdapat tiga jenis utama. Pertama, kelompok kelainan fisik, mencakup tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan non-fisik, melibatkan tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, mengacu pada mereka yang mengalami lebih dari satu jenis kelainan.

Berikut ini penjabaran dari pengertian jenis penyandang disabilitas fisik yaitu sebagai berikut (Akhmad, 2015. hlm. 303):

1) Tunanetra

Individu tunanetra adalah mereka yang mengalami kendala dalam penglihatan dan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan memiliki kemampuan melihat yang sangat rendah (*low vision*). Menurut Somantri (2006), karakteristik tunanetra memunculkan perdebatan terkait masalah intelegensi. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tunanetra mengalami keterbelakangan dalam pemahaman tugas-tugas konseptual. Hambatan tersebut dapat terletak pada stimulasi sensori, komunikasi, dan konsep perkembangan kognitif itu sendiri.

2) Tunarungu

Tunarungu merujuk pada keadaan kehilangan pendengaran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Berdasarkan penelitian oleh Suparno dan Tin Suharmini (2005), karakteristik anak tunarungu melibatkan kemampuan *recall*-nya untuk mata pelajaran yang menggunakan bahasa, cenderung kurang, sementara untuk mata pelajaran yang berfokus pada praktek, seperti olahraga dan menggambar, hasilnya lebih baik. Dalam konteks pelajaran yang menggunakan verbal, anak tunarungu menghadapi kesulitan dalam menangkap pesan yang disampaikan oleh guru, dan terkadang pesan yang diterima tidak sesuai, menyebabkan kesalahan persepsi.

3) Tunadaksa

Tunadaksa merujuk pada kondisi di mana fungsi normal tulang, otot, dan sendi terganggu atau rusak akibat adanya hambatan bentuk atau gangguan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau bahkan dapat bersifat bawaan sejak lahir. Tunadaksa sering diartikan sebagai suatu keadaan yang menghambat aktivitas individu karena adanya kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan dan kehidupan mandiri. Karakteristik pada penyandang tunadaksa sering mencakup ekspresi kesedihan, depresi, tingkat stres yang tinggi, jarang tersenyum, kecemasan, penat, dan respons emosional yang lebih intens. Pola emosi pada anak tunadaksa dapat melibatkan perasaan seperti sedih, marah, cemas, takut, dan kecenderungan untuk menarik diri. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua individu tunadaksa menunjukkan karakteristik yang sama. Keadaan tunadaksa dapat menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik atau gerakan, termasuk olahraga seperti berjalan, lari, dan loncat, serta menghambat kemampuan untuk menjelajahi lingkungan sekitar.

Berbagai penggunaan istilah "tuna" terkait dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami seseorang dapat dijelaskan sebagai berikut (Dini Widinarsih, 2019. hlm. 131):

- 1) Tunadaksa: keterbatasan tubuh.
- 2) Tunagrahita: keterbatasan pikiran, lemah daya tangkap, keterbelakangan mental.
- 3) Tunalaras: mengendalikan emosi dan sosial.
- 4) Tunanetra: tidak dapat melihat atau buta.
- 5) Tunarungu: tidak mendengar, tuli.
- 6) Tunawicara: tidak dapat berbicara, bisu.

c. **Karakteristik Penyandang Disabilitas**

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Elizabeth Anderson dan Lynda Clarke Disability in Adolescence dalam Kusmana dan Napsiyah (2007. hlm. 85) menyebutkan bahwa anak-anak yang disable memiliki kehidupan yang lebih menyendiri, dan ketika mereka melakukan diluar rumah, mereka lebih melakukan

kegiatan diluar rumah, mereka lebih melakukan kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga. Selain itu mayoritas anak dalam kelompok disabilitas ini hanya berhubungan dengan mereka yang juga memiliki kekurangan.

Ketidakinginan untuk bersosialisasi bahkan tidak ingin keluar dari lingkungannya adalah salah satu karakteristik kelompok disabilitas. Mereka sadar bahwa keadaan fisiknya dianggap “berbeda” akan menimbulkan kekagetan dan keanehan tersendiri untuk orang lain yang masih tabu dengan penyandang disabilitas. Respon masyarakat tersebutlah yang mengakibatkan kelompok disabilitas lebih memilih untuk tidak melakukan kontak sosial dengan masyarakat pada umumnya.

d. Dampak Disabilitas Pada Identitas Diri

Edi Suharto (2005. hlm. 98-117) berpendapat bahwa isu riset yang mengkaji dampak disabilitas pada identitas diri, khususnya dalam konteks aktivitas sehari-hari, menjadi sangat relevan dan memunculkan sejumlah temuan yang signifikan. Survei terhadap penyandang disabilitas menegaskan ketidakpuasan mereka terhadap kehidupan sosial, terutama di kalangan yang lebih muda. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikososial dan kehidupan sehari-hari. Para responden yang berusia lebih muda, yang seharusnya sedang aktif dalam berinteraksi sosial dan mengeksplorasi gaya hidup, mengalami kesulitan yang mendalam. Usia ini biasanya merupakan periode di mana individu lebih intens berinteraksi dengan teman sebaya dan terlibat dalam aktivitas sosial di luar rumah. Namun, kondisi disabilitas seringkali menyebabkan isolasi sosial yang signifikan, mengakibatkan kehilangan kontak dengan teman-teman sebaya.

Dampak dari isolasi sosial ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk aspirasi karir yang rendah dan marginalisasi di pasar tenaga kerja. Para penyandang disabilitas sering mengalami keterbatasan dalam mengakses sarana umum, lingkungan yang terbangun, serta pilihan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka menghadapi keterlambatan dalam melewati tahapan hidup seperti meninggalkan rumah, menikah, menjadi orang tua,

dan memasuki dunia kerja. Dalam konteks kehidupan sosial, disabilitas bukan hanya sekadar tantangan fisik, melainkan juga memberikan dampak psikologis yang signifikan. Masyarakat seringkali melihat kelompok disabilitas sebagai "berbeda", yang dapat menyebabkan shock dan rasa terpukul di kalangan individu dengan disabilitas. Adanya stigma ini memperburuk kondisi, memaksa beberapa individu dengan disabilitas untuk menghindari interaksi sosial dengan masyarakat, sehingga mengorbankan waktu yang seharusnya dapat dihabiskan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas, baik dari segi fisik maupun aspek sosial dan psikologis. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih inklusif dan memahami bahwa keberagaman adalah sebuah kenormalan, bukan "kesalahan" atau "kekurangan".

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merujuk pada kajian penelitian orang lain sebagai sumber landasan atau referensi yang menginspirasi. Sejumlah kesamaan ditemukan dalam pembahasan antara skripsi yang peneliti kaji dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tertentu juga diidentifikasi, menandai upaya peneliti untuk memberikan kontribusi yang unik dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pentingnya mengkaji penelitian terdahulu terletak pada upaya memperjelas variabel penelitian dan mendefinisikan ciri khas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan mempertimbangkan temuan dan metodologi penelitian sebelumnya, peneliti dapat merancang suatu pendekatan yang lebih terfokus dan relevan dengan konteks atau fenomena yang sedang diteliti.

Kajian penelitian terdahulu umumnya dilakukan oleh peneliti akademik yang kemudian mempublikasikan hasilnya melalui berbagai media, baik jurnal cetak maupun daring (*online*). Proses ini menciptakan suatu basis pengetahuan yang dinamis dan berkembang dalam bidang penelitian tertentu. Berikut adalah beberapa

contoh penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang disusun oleh peneliti:

a. Adinda Novita Sari (2023)

Dalam penelitiannya yang berjudul *“Pemberdayaan Disabilitas Melalui Program Kewirausahaan Oleh Komunitas Persatuan Penyandang Cacat dan Center Advokasi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”*. Penelitian ini membahas mengenai penyandang disabilitas yang seringkali dijadikan sebagai objek santunan dan tidak jarang dari mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi baik dari individu maupun dari lembaga dan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji upaya untuk mengurangi ketidakberdayaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sebuah program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas oleh komunitas Perpenca melalui program kewirausahaan melibatkan proses koordinasi, pelatihan, dan pemasaran. Faktor-faktor penghambat termasuk anggaran, transportasi, dan kebijakan pemerintah, sementara dukungan masyarakat dan pemanfaatan media sosial menjadi faktor pendukungnya. Persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Adinda Novita Sari dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada fokus kajian pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Adinda Novita Sari lebih menitikberatkan pada program kewirausahaan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan fokus pada pengembangan keilmuan dan keterampilan penyandang disabilitas, dengan penekanan pada pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka di masa depan.

b. Mia Maisyatur Rodiah (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul *“Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan”*. Penelitian ini membahas tentang salah satu cara guna memberdayakan kelompok disabilitas melalui kegiatan keterampilan, seperti halnya Yayasan Wisma Cheshire yang memberdayakan kelompok disabilitas

melalui kegiatan keterampilan *handicraft* dan *woodwork*. Dengan kegiatan tersebut para disabilitas mampu menjalani kehidupan yang mandiri seperti masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi serta studi dokumentasi, guna mengungkapkan suatu fenomena pada kelompok disabilitas di Yayasan Wisma Cheshire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan keterampilan *woodwork* dan *handicraft* ini pihak yayasan menggunakan sistem "*Learning by Doing*" antara satu *resident* dengan *resident* lainnya, sehingga mereka saling share dan saling mengajarkan antara satu sama lain. Banyak dari masyarakat yang mulai mengakui dan menyenangi hasil karya para disabilitas. Persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Mia Maisyatur Rodiah dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada fokus kajian pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan variasi variabel penelitian yang diangkat dalam kedua penelitian tersebut.

c. Ariel Pandita & Erna Herawati (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul "*Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung*" Penelitian ini membahas kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelompok Berani Binangkit (KBB) di Kota Bandung, yang didominasi oleh anggota penyandang disabilitas fisik. Kegiatan utama kelompok ini adalah pembuatan kaki palsu. Kelompok ini berfungsi sebagai tempat bagi para anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi terlibat dalam seluruh kegiatan KBB serta wawancara mendalam dengan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak signifikan pada kondisi ekonomi rumah tangga anggota. Para anggota mampu membangun identitas sosial yang lebih kuat sebagai penyandang disabilitas yang berdaya, sehingga merasa sebagai bagian dari masyarakat yang "normal". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji proses pemberdayaan kelompok

disabilitas. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian yang berbeda dan variabel penelitian berbeda.

d. Maya Shofiyatul Laeli (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Difabel Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraf Karang Sari Buayan Kebumen.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, berbagi pengalaman pribadi, dan penyediaan modal usaha. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kreativitas masyarakat difabel serta memberikan mereka kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, kegiatan pemberdayaan ini secara tidak langsung mengimplementasikan nilai keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, melalui adanya unsur tolong-menolong antar sesama manusia dan memberikan peluang kepada masyarakat difabel untuk berusaha.

e. Putri Rahmadani (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembinaan Bagi Para Penyandang Difabel dan Trauma Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”* penelitian ini menjelaskan tentang Penyediaan dan perawatan kesejahteraan tenaga kerja melibatkan sejumlah aspek, termasuk: 1) Pembentukan keterampilan kerja; 2) Peningkatan kemampuan kerja; 3) Penyebaran, penyaluran, dan penggunaan tenaga kerja; 4) Peningkatan mobilitas; 5) Jaminan hak tenaga kerja terkait imbalan dan hak perusahaan terkait kehidupan usaha; 6) Jaminan kenyamanan dan ketenangan dalam hubungan kerja; 7) Penghindaran dan pencegahan bahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam program Pembinaan Bagi Para Penyandang Difabel dan Trauma serta Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diulas dan sesuai dengan indikator model implementasi program oleh David C.

Korten. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi telah diidentifikasi dan dinilai berdasarkan indikator G. Shabbier Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

2.3 Kerangka Konseptual



(Sumber: Peneliti, 2024)

Kelompok disabilitas di *Difabel Creative Center*, Daarut Tauhiid Kota Bandung, dihadapkan pada tantangan ketidakberuntungan dan stigma dalam pekerjaan dan hubungan sosial. Adanya persepsi negatif dan diskriminasi menyulitkan penyandang disabilitas untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, mereka menghadapi kendala dalam pengembangan kemandirian dan keterampilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, *Difabel Creative Center* menerapkan program

pemberdayaan melalui pelatihan menjahit, pelatihan grafis dan sablon, serta pijat refleksi.

Proses pemberdayaan ini bertujuan memberikan kelompok disabilitas keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan *output* yang positif dapat tercapai, seperti peningkatan keterampilan, perkembangan mental dan spiritual, serta peluang untuk bekerja atau membuka usaha sendiri. *Outcome* yang diharapkan adalah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi, membuat mereka lebih siap berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana *Difabel Creative Center* berperan dalam mengatasi permasalahan dan mewujudkan hasil yang positif bagi kelompok disabilitas yang mereka bina.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti:

- a. Bagaimana tahapan pemberdayaan kelompok disabilitas melalui program *Difabel Creative Center*?
- b. Bagaimana hasil dari program *Difabel Creative Center* dalam pemberdayaan kelompok disabilitas di Daarut Tauhiid Peduli Kota Bandung?